

**DINAMIKA PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DAN DAMPAKNYA KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI
KELUARGA PENERIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ELI ARYANTI

NPM 2416041114



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang Masalah	2
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Grand Theory: Teori Administrasi Publik	13
2.2.2 Middle Range Theory: Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter & Van Horn).....	14
2.2.3 Applied Theory: Teori Kesejahteraan Sosial	16
2.3 Kerangka Berpikir	17
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian	18
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Tipe Penelitian.....	19
3.2 Fokus Penelitian	20
3.3 Lokasi Penelitian	21
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6 Teknik Analisis Data	25
3.7 Teknik Keabsahan Data	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Di Indonesia, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan semata, tetapi juga sebagai bentuk kerentanan sosial akibat terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, kemiskinan bersifat multidimensional, mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemerintah Indonesia sejak masa reformasi telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial yang diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Salah satu program yang dinilai memiliki dampak luas adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2007 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

PKH merupakan bentuk program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan kewajiban tertentu, seperti memastikan anak bersekolah, memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita, serta mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial di tingkat lokal. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mengurangi beban ekonomi sementara, tetapi juga untuk mendorong investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memperkuat kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Dalam konteks tersebut, PKH diposisikan sebagai kebijakan strategis untuk mendukung visi pembangunan manusia Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, implementasi PKH di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Meskipun program ini telah menunjukkan capaian positif secara nasional dalam menurunkan angka kemiskinan, pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, menjadi contoh menarik untuk dikaji karena karakteristik sosial

ekonominya yang beragam dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2024, terdapat lebih dari 32.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 20 kecamatan. Walaupun program ini telah memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenyataannya masih banyak keluarga yang belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Sebagian penerima manfaat masih berada pada kondisi ekonomi yang sama, bahkan beberapa di antaranya tetap bergantung pada bantuan sosial tanpa perubahan berarti dalam aspek kemandirian ekonomi.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya dinamika pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung. Di satu sisi, program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat lebih rutin bersekolah, sementara tingkat kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak meningkat. Namun di sisi lain, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya peran pendamping sosial, dan minimnya kegiatan pemberdayaan pasca penerimaan bantuan. Selain itu, sebagian penerima manfaat masih memiliki pola pikir ketergantungan terhadap bantuan sosial, sehingga tujuan program untuk menciptakan kemandirian ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Masalah implementasi ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu. Misnaniarti (2019) menyatakan bahwa keberhasilan PKH sangat bergantung pada efektivitas pendampingan dan tingkat partisipasi penerima manfaat. Penelitian Rahayu (2022) juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya monitoring menghambat pencapaian tujuan program. Sementara Yulianti dan Meutia (2023) dalam penelitiannya mengenai efektivitas program berbasis komunitas di Indonesia menemukan bahwa faktor lokalitas dan budaya masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH perlu dipahami bukan hanya sebagai mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara pelaksana kebijakan, pendamping sosial, dan masyarakat penerima manfaat.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan publik, pelaksanaan PKH dapat dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pentingnya enam variabel utama dalam keberhasilan implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Dalam konteks PKH, sumber daya manusia berupa pendamping sosial menjadi faktor kunci yang berperan langsung dalam menghubungkan kebijakan dengan masyarakat. Ketika jumlah pendamping terbatas atau kompetensinya tidak merata, maka proses sosialisasi, verifikasi, dan pembinaan menjadi tidak optimal. Selain itu, komunikasi antarinstansi pelaksana sering kali menghadapi kendala birokratis, yang berdampak pada koordinasi di lapangan.

Permasalahan pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung juga dapat dijelaskan melalui analisis sebab-akibat (*fishbone analysis*). Masalah utama yang muncul adalah belum optimalnya dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi kebijakan, implementasi program di tingkat lokal belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, kapasitas pendamping sosial dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi juga berpengaruh terhadap kurangnya tindak lanjut atas permasalahan yang muncul di lapangan. Di samping itu, partisipasi masyarakat penerima manfaat masih tergolong rendah, sehingga kegiatan pemberdayaan belum berjalan optimal. Faktor sosial budaya turut memperkuat situasi ini, di mana sebagian penerima manfaat masih memiliki pola pikir ketergantungan terhadap bantuan sosial. Akar permasalahan tersebut menunjukkan adanya tantangan struktural dan kultural yang perlu ditangani secara simultan agar tujuan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan PKH bukan sekadar soal distribusi bantuan, tetapi mencerminkan proses kebijakan sosial yang kompleks, di mana hasilnya dipengaruhi oleh konteks sosial, interaksi antaraktor, serta respons

masyarakat terhadap kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara kualitatif bagaimana dinamika pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung berlangsung serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini berfokus pada upaya menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan penerima bantuan serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menilai efektivitas kebijakan secara kuantitatif, tetapi juga berupaya memahami dimensi sosial yang menyertai pelaksanaan program di lapangan.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi PKH sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik di bidang administrasi publik dan kebijakan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dan pendamping sosial dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan PKH di masa mendatang. Dengan memahami dinamika di tingkat lokal, diharapkan kebijakan sosial seperti PKH dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat miskin menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan dinamika pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Untuk mengetahui dan memahami dampak sosial ekonomi yang dialami keluarga penerima manfaat setelah mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek utama, yaitu teoretis dan praktis

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan sosial dan dinamika kebijakan publik di tingkat lokal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia yang bersifat kompleks dan kontekstual. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pentingnya aspek sosial dan budaya dalam pelaksanaan kebijakan, serta menjadi referensi bagi pengembangan model implementasi kebijakan berbasis masyarakat (*community-based policy implementation*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi,

sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, peningkatan kapasitas pendamping sosial, dan perumusan strategi pemberdayaan yang lebih partisipatif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan, sehingga bantuan sosial tidak hanya bersifat karitatif tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin secara berkelanjutan.

3. Manfaat Kebijakan

Selain itu, dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan perlindungan sosial di masa mendatang. Temuan empiris mengenai dinamika dan kendala pelaksanaan PKH dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal, partisipatif, dan berkeadilan. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong pembuat kebijakan untuk mengembangkan model implementasi kebijakan sosial yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik administrasi publik, tetapi juga memberikan nilai strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola kebijakan sosial yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk memperkuat landasan teori serta memahami sejauh mana topik mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Kajian ini membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) dan menemukan relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan, namun masih menghadapi kendala dalam pemberdayaan ekonomi dan partisipasi penerima manfaat. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi & Perbedaan
1	Misnaniarti (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga Miskin di Indonesia	Kualitatif	PKH meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, namun belum optimal dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga.	Relevan karena menyoroti efektivitas PKH; berbeda karena penelitian ini lebih menekankan pada dinamika pelaksanaan di tingkat daerah

					(Bandar Lampung).
2	Rahayu (2022)	Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kualitatif Deskriptif	Faktor komunikasi dan koordinasi antarinstansi memengaruhi keberhasilan implementasi PKH.	Relevan karena membahas pelaksanaan PKH di daerah; berbeda karena penelitian ini berfokus pada konteks perkotaan dengan dinamika sosial ekonomi yang lebih kompleks.
3	Fatmawati (2021)	Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial dalam Program Keluarga Harapan di Kota Surabaya	Kualitatif	Keberhasilan program dipengaruhi oleh sumber daya manusia, komunikasi, dan dukungan lingkungan sosial.	Relevan karena sama-sama mengkaji implementasi kebijakan sosial; berbeda karena penelitian ini menambahkan

					analisis dampak sosial ekonomi keluarga penerima manfaat.
4	Hapsari (2021)	Peran Pendamping Sosial dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Kualitatif Fenomenologi	Pendamping sosial berperan penting sebagai agen perubahan, namun jumlah dan kapasitasnya masih terbatas.	Relevan karena membahas peran pelaksana kebijakan; berbeda karena penelitian ini meninjau peran tersebut dalam konteks dinamika dan dampak sosial ekonomi penerima manfaat.
5	Sulastrri & Rahmadani (2020)	Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesejahteraan	Deskriptif Kuantitatif	PKH berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi belum signifikan	Relevan karena menilai dampak kesejahteraan; berbeda karena penelitian ini

		Rumah Tangga Penerima di Sumatera Selatan		dalam pemberdayaan ekonomi.	menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada perubahan sosial ekonomi secara mendalam.
6	Nugraha (2024)	Kebijakan Perlindungan Sosial dan Ketergantungan Bantuan: Studi atas Dampak PKH di Wilayah Perkotaan	Kualitatif	Penerima PKH di wilayah perkotaan lebih lambat mandiri karena pola konsumtif dan keterbatasan peluang kerja.	Relevan karena konteksnya sama-sama wilayah perkotaan; berbeda karena penelitian ini mengkaji dinamika kebijakan dan faktor sosial budaya di Bandar Lampung.
7	Yulianti & Meutia (2023)	The Cost- Effectiveness Analysis of Community- Based Sanitation	Kualitatif & Analisis Kebijakan	Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program	Relevan secara konsep karena menekankan pentingnya partisipasi

		Program in Indonesia		berbasis komunitas.	masyarakat; berbeda karena fokus penelitian ini pada pelaksanaan PKH sebagai kebijakan sosial.
--	--	-------------------------	--	------------------------	--

Dari hasil kajian berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas dan keberlanjutan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas pendamping sosial, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi penerima manfaat. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada evaluasi hasil dan efektivitas program, sementara aspek dinamika pelaksanaan, interaksi sosial, serta makna yang dirasakan oleh penerima manfaat masih jarang dikaji secara mendalam.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada dinamika pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara lebih mendalam pengalaman, persepsi, dan dampak sosial ekonomi yang dialami oleh keluarga penerima manfaat dan pelaksana kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami pelaksanaan kebijakan sosial dalam konteks lokal secara lebih komprehensif dan kontekstual.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian kualitatif, teori berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan dan menuntun peneliti dalam memahami fenomena sosial secara mendalam. Teori tidak hanya digunakan untuk membuktikan hipotesis seperti

dalam penelitian kuantitatif, tetapi juga untuk menafsirkan makna, interaksi, dan dinamika sosial yang muncul dalam proses kebijakan publik. Teori membantu peneliti melihat hubungan antara konsep, variabel, dan tindakan sosial yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki dimensi administratif, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga tingkatan teori, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* untuk memahami fenomena secara komprehensif.

2.2.1 Grand Theory: Teori Administrasi Publik

Teori administrasi publik menjadi landasan konseptual utama yang menjelaskan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Menurut Dwight Waldo (1948), administrasi publik tidak hanya berfokus pada efisiensi dan rasionalitas birokrasi, tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan dalam pelayanan publik. Administrasi publik dipandang sebagai instrumen negara untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan sosial seperti PKH, harus mencerminkan tanggung jawab moral pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan warga negaranya.

Dalam perkembangannya, teori administrasi publik mengalami transformasi paradigma dari *Old Public Administration (OPA)* ke *New Public Management (NPM)*, dan kemudian ke *New Public Service (NPS)*. OPA menekankan efisiensi birokrasi dan kepatuhan terhadap hierarki, sedangkan NPM lebih berfokus pada efektivitas dan hasil kebijakan melalui prinsip-prinsip manajemen sektor swasta. Namun, kedua pendekatan ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, Denhardt dan Denhardt (2015) memperkenalkan paradigma NPS yang menempatkan warga negara sebagai mitra aktif dalam proses kebijakan publik.

Konsep *New Public Service* menekankan bahwa pemerintah harus melayani warga, bukan semata-mata pelanggan atau pengguna jasa. Pelayanan publik harus berlandaskan pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks

Program Keluarga Harapan, paradigma ini berarti pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong penerima manfaat untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan PKH bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi juga proses sosial yang membangun kapasitas masyarakat miskin agar mampu mandiri.

Selain itu, teori administrasi publik juga mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan sosial. Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan sosial ini tercermin dalam amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya, setiap kebijakan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung harus dipahami sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik yang bersifat manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, teori administrasi publik sebagai *grand theory* memberikan dasar filosofis dan normatif dalam penelitian ini. Teori ini menegaskan bahwa kebijakan publik seperti PKH tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan. Pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai prinsip *good governance*, dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pelayanan publik.

2.2.2 Middle Range Theory: Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter & Van Horn)

Sebagai teori tingkat menengah, teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Teori ini berfokus pada hubungan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan bukan hanya soal prosedur administratif, melainkan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sumber daya, komunikasi, dan kondisi sosial. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan sosial seperti PKH dijalankan dalam konteks pemerintahan daerah.

Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana. Keenam faktor ini saling berhubungan dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks PKH, hal ini terlihat pada kualitas pendamping sosial, ketersediaan anggaran, serta koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah pusat, dan masyarakat penerima manfaat. Semakin baik faktor-faktor tersebut berfungsi, semakin tinggi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain itu, teori ini juga berkaitan dengan konsep *Street-Level Bureaucracy* dari Michael Lipsky (1980) yang menekankan pentingnya peran pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Lipsky menyatakan bahwa pelaksana lapangan memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Dalam konteks PKH, pendamping sosial berperan sebagai aktor kunci yang menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial penerima manfaat. Hal ini menjelaskan mengapa implementasi PKH bisa berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya meskipun pedomannya sama.

Teori implementasi kebijakan juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan. Hambatan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menurunkan efektivitas pelaksanaan. Dalam konteks PKH di Kota Bandar Lampung, koordinasi yang lemah antara pendamping sosial dan instansi pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan program. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan informasi, keselarasan tujuan, dan komitmen aktor pelaksana di lapangan.

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan memberikan kerangka analitis untuk menilai efektivitas pelaksanaan PKH dari sisi struktur, perilaku, dan komunikasi antaraktor kebijakan. Teori ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu menghasilkan dampak optimal di lapangan. Melalui teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang

memengaruhi keberhasilan atau hambatan pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung.

2.2.3 Applied Theory: Teori Kesejahteraan Sosial

Sebagai teori terapan, **teori** kesejahteraan sosial digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan sosial berdampak terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat. Menurut Wilensky dan Lebeaux (1965), kesejahteraan sosial mencakup seluruh upaya yang dilakukan negara untuk memastikan setiap individu hidup layak dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Teori ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, dan budaya. Dengan demikian, kebijakan sosial seperti PKH harus dilihat sebagai instrumen untuk membangun kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Teori kesejahteraan sosial juga menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan melalui kebijakan yang berkeadilan. Midgley (2017) memperkenalkan konsep *developmental welfare*, yaitu pendekatan kesejahteraan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan. Program kesejahteraan harus membantu masyarakat miskin menjadi mandiri dengan meningkatkan kapasitas dan partisipasi sosial mereka. Dalam konteks PKH, bantuan tunai bersyarat diharapkan dapat mendorong keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan pendidikan anak, kesehatan, dan kemampuan ekonomi keluarga.

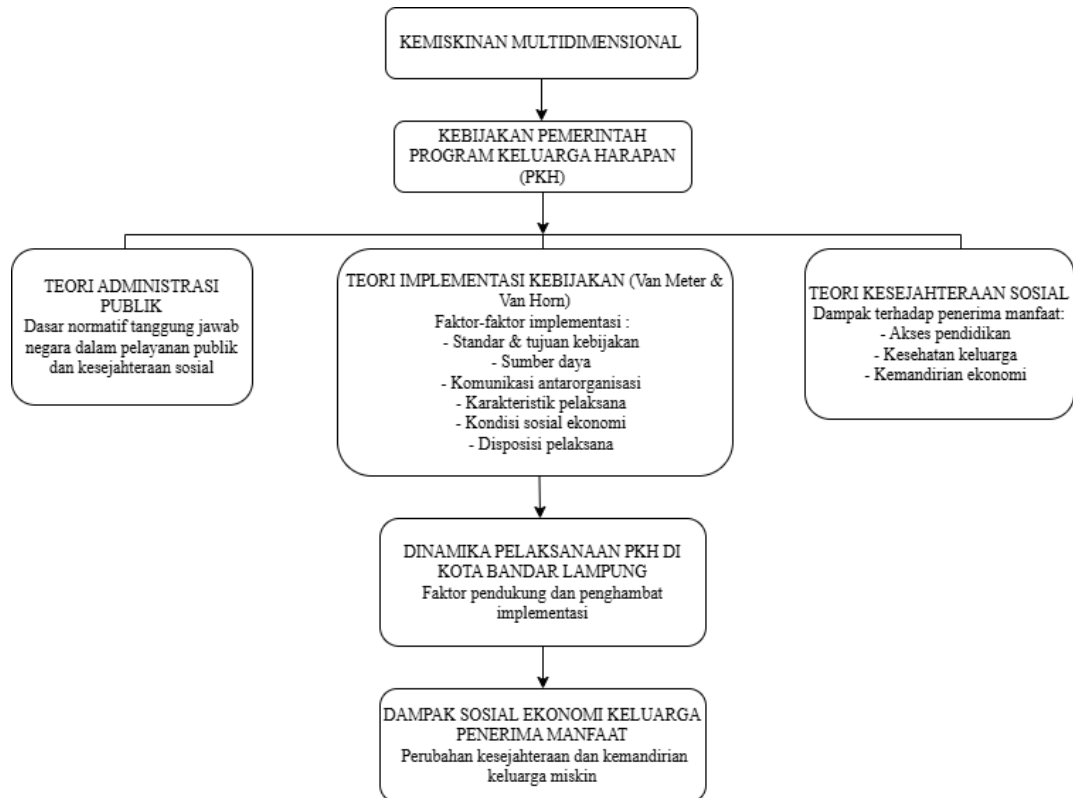
Selain itu, Spicker (2020) menekankan bahwa efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial sangat bergantung pada kesesuaian dengan nilai dan norma sosial masyarakat setempat. Program yang tidak mempertimbangkan konteks lokal berisiko menimbulkan ketergantungan dan resistensi sosial. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, faktor sosial budaya seperti solidaritas komunal, stigma kemiskinan, dan persepsi terhadap bantuan sosial turut memengaruhi hasil pelaksanaan PKH. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Teori kesejahteraan sosial juga membantu menilai sejauh mana kebijakan sosial dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat. Program seperti PKH tidak hanya diukur dari peningkatan ekonomi, tetapi juga dari perubahan perilaku dan hubungan sosial penerima manfaat. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar konseptual bagi penelitian ini dalam memahami dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan PKH. Kebijakan sosial yang baik bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya.

Secara keseluruhan, teori kesejahteraan sosial memberikan landasan aplikatif bagi penelitian ini untuk menganalisis perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada keluarga penerima manfaat PKH. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah kehidupan penerima menjadi lebih produktif dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini penting agar hasil penelitian dapat menggambarkan dinamika sosial ekonomi yang lebih komprehensif.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menjelaskan alur pemikiran penelitian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Bandar Lampung. Program ini merupakan kebijakan sosial pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu Teori Administrasi Publik untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan 17actor, Teori Implementasi Kebijakan untuk menilai proses pelaksanaan dan 17actor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program, serta Teori Kesejahteraan Sosial untuk memahami dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Dengan demikian, keberhasilan PKH sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan dan tingkat partisipasi penerima manfaat dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial ekonomi yang berkelanjutan..



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif karena bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung di Kota Bandar Lampung serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik tindakan dan pengalaman manusia melalui proses yang natural dan kontekstual. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memanipulasi variabel, melainkan berfokus pada pemahaman yang holistik terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menganalisis fenomena kebijakan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Pendekatan kualitatif deskriptif menekankan pada pencarian makna dan pemahaman daripada pengujian hipotesis atau pengukuran kuantitatif. Yin (2018) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif cocok digunakan ketika peneliti ingin mengungkapkan realitas sosial sebagaimana adanya berdasarkan hasil observasi langsung dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami interaksi antaraktor kebijakan, mulai dari pendamping sosial, pejabat Dinas Sosial, hingga keluarga penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini berlandaskan paradigma post-positivistik, yang mengakui bahwa realitas sosial bersifat jamak dan dipengaruhi oleh nilai serta pengalaman manusia (Lincoln & Guba, 1985). Oleh sebab itu, peneliti berperan aktif dalam menggali makna dari data empiris yang muncul selama penelitian.

Melalui tipe penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan secara rinci proses implementasi kebijakan sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap dimensi sosial,

administratif, dan ekonomi dari kebijakan sosial tersebut. Dengan kata lain, metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menangkap realitas sosial sebagaimana dirasakan dan dimaknai oleh para pelaku di lapangan. Secara konseptual, pendekatan ini berfungsi untuk menjembatani antara teori dan praktik kebijakan sosial dalam konteks pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar kajian tidak melebar dan tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori, penelitian ini memiliki tiga fokus utama. Pertama, dinamika pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung yang meliputi proses sosialisasi, penetapan penerima manfaat, penyaluran bantuan, hingga kegiatan pendampingan sosial. Dinamika ini mencerminkan bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam konteks lokal melalui peran dinas sosial dan pendamping sosial. Kedua, penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi PKH, termasuk sumber daya manusia, komunikasi antarinstansi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketiga, penelitian ini memusatkan perhatian pada dampak sosial ekonomi terhadap keluarga penerima manfaat, seperti peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, dan kemandirian ekonomi.

Setiap fokus penelitian memiliki keterkaitan erat dengan teori yang digunakan. Dinamika pelaksanaan PKH dijelaskan melalui teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), sedangkan faktor sosial ekonomi penerima manfaat dianalisis menggunakan teori kesejahteraan sosial (Wilensky & Lebeaux, 1965; Midgley, 2017). Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), pembatasan fokus dalam penelitian kualitatif membantu peneliti memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini dirancang untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan kebijakan, peran aktor pelaksana, serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dengan menetapkan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

gambaran komprehensif tentang efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah perkotaan.

Fokus penelitian ini juga mencakup upaya memahami bagaimana nilai-nilai partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial diinternalisasi dalam pelaksanaan PKH. Aspek ini penting karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada faktor administratif, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat. Denhardt dan Denhardt (2015) melalui paradigma *New Public Service* menekankan bahwa pelayanan publik harus mendorong partisipasi warga negara, bukan sekadar menyalurkan bantuan. Dengan demikian, fokus penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam kebijakan sosial, bukan hanya objek kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kota ini dipilih secara purposive karena memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam dan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tertinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2024, terdapat lebih dari 32.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 20 kecamatan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti pelaksanaan program perlindungan sosial dalam konteks perkotaan dengan dinamika sosial ekonomi yang kompleks.

Kota Bandar Lampung juga menarik untuk dikaji karena tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan variasi masalah sosial yang berbeda dibandingkan daerah pedesaan. Faktor-faktor seperti mobilitas penduduk, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan sosial seperti PKH. Melalui penelitian di wilayah ini, peneliti berupaya memahami bagaimana kebijakan nasional diimplementasikan dalam konteks lokal yang heterogen, serta bagaimana peran pendamping sosial dan partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan program.

Selain itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris bahwa Kota Bandar Lampung merupakan pusat administrasi dan ekonomi di Provinsi Lampung, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki relevansi yang lebih luas untuk pengembangan kebijakan sosial di wilayah perkotaan lainnya. Fokus penelitian diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah penerima manfaat cukup besar, seperti Kecamatan Kedaton, Rajabasa, Telukbetung, dan Panjang. Pemilihan lokasi ini memungkinkan peneliti menggali beragam pengalaman dan pandangan dari pelaksana maupun penerima manfaat PKH secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konteks pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang keduanya memiliki fungsi saling melengkapi. Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti pendamping sosial, pejabat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, serta keluarga penerima manfaat (KPM). Melalui data primer, peneliti dapat menggali persepsi, pengalaman, dan interpretasi subjektif dari para informan mengenai pelaksanaan program di lapangan. Data primer inilah yang menjadi inti dari penelitian kualitatif karena memberikan gambaran nyata mengenai situasi sosial yang diteliti.

Menurut Creswell (2018), data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan menggali makna di balik pengalaman manusia. Oleh karena itu, data primer tidak hanya berupa jawaban verbal, tetapi juga mencakup ekspresi, gestur, serta konteks sosial tempat interaksi terjadi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pelaksana dan penerima PKH di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal dan bagaimana masyarakat menafsirkan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi mereka.

Dengan demikian, data primer memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang kaya dan mendalam mengenai realitas sosial di lapangan.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tertulis, baik yang bersifat dokumen resmi maupun literatur ilmiah. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan pelaksanaan PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil penelitian dan artikel jurnal yang relevan. Menurut Angrosino (2018), penggunaan data sekunder membantu memperluas pemahaman peneliti terhadap konteks kebijakan dan memberikan pembandingan terhadap hasil temuan lapangan. Data sekunder juga berguna untuk memperkuat validitas hasil penelitian dengan menghadirkan bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara akademik. Dengan demikian, penggabungan antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan kredibel.

Selain sebagai pelengkap, data sekunder juga berfungsi untuk memberikan dasar teoretis bagi interpretasi hasil penelitian. Dokumen kebijakan, laporan evaluasi, dan data statistik membantu menjelaskan latar belakang program PKH serta menghubungkan temuan lapangan dengan konteks kebijakan nasional. Dengan memadukan kedua jenis data tersebut, penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman mikro tentang pengalaman masyarakat, tetapi juga memberikan perspektif makro mengenai arah dan efektivitas kebijakan sosial pemerintah. Pendekatan triangulatif terhadap sumber data ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2019) yang menekankan pentingnya penggunaan berbagai sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, kombinasi data primer dan sekunder menjadi pondasi kuat dalam analisis pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan memperoleh informasi yang mendalam, lengkap, dan faktual mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Kvale (2015), pengumpulan data harus dilakukan secara interaktif dan

fleksibel agar peneliti mampu menangkap makna yang terkandung di balik pernyataan informan. Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan data yang valid dan komprehensif. Pemilihan teknik ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada eksplorasi makna dan pemahaman terhadap perilaku sosial.

Teknik pertama adalah wawancara mendalam (in-depth interview), yang dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka. Teknik ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti dan informan untuk berdialog serta mengembangkan topik yang muncul selama wawancara. Informan penelitian terdiri dari pendamping sosial PKH, pejabat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, keluarga penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Menurut Creswell (2018), wawancara kualitatif merupakan sarana utama untuk memahami pengalaman dan pandangan individu secara mendalam. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pencatatan lapangan dan perekaman suara (dengan izin informan) untuk menjaga akurasi data yang diperoleh.

Teknik kedua adalah observasi partisipatif, yaitu kegiatan pengamatan langsung terhadap aktivitas pelaksanaan PKH di lapangan. Peneliti hadir dalam kegiatan seperti pertemuan kelompok, sosialisasi, atau kegiatan pemberdayaan yang diikuti oleh keluarga penerima manfaat. Observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana interaksi sosial, komunikasi antaraktor, dan dinamika pelaksanaan kebijakan berlangsung secara nyata. Menurut Angrosino (2018), observasi partisipatif memungkinkan peneliti menangkap informasi nonverbal dan konteks sosial yang tidak selalu diungkapkan dalam wawancara. Data hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes) yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang bermakna.

Teknik ketiga adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui berbagai dokumen resmi seperti laporan tahunan, data statistik, pedoman pelaksanaan PKH, dan arsip kegiatan. Dokumen juga meliputi hasil penelitian terdahulu, foto kegiatan,

serta media publikasi yang relevan. Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris dan referensi pelengkap untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Melalui dokumen, peneliti dapat memverifikasi data yang diperoleh dari informan dan memperoleh pemahaman historis mengenai pelaksanaan PKH. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu dan berkesinambungan agar data yang diperoleh bersifat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak tahap awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi tiga langkah utama, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Model ini dianggap paling sesuai karena memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menafsirkan makna dari data lapangan secara mendalam, kontekstual, dan berulang.

Langkah pertama adalah reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti membaca ulang catatan lapangan, transkrip wawancara, serta hasil observasi untuk memilah data yang bermakna dengan cara menandai tema, kategori, atau pola tertentu. Proses reduksi dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat menyesuaikan fokus pengamatan di lapangan berdasarkan temuan sementara. Tujuan dari tahap ini adalah agar data yang semula sangat banyak dapat disusun secara sistematis dan mudah dianalisis sesuai rumusan masalah.

Langkah kedua adalah penyajian data (data display), yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisir agar mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif tidak hanya berupa tabel atau grafik seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi lebih sering berbentuk uraian naratif, matriks tema, atau diagram hubungan antar konsep. Pada penelitian ini, penyajian

data dilakukan dalam bentuk deskripsi tematik yang menggambarkan dinamika pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peran para pelaksana kebijakan, serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antar tema dan memperkuat argumentasi teoretis dalam pembahasan.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Proses penarikan kesimpulan tidak dilakukan sekali saja, melainkan berlangsung secara bertahap selama pengumpulan dan analisis data. Peneliti melakukan *verifikasi* secara terus-menerus dengan membandingkan temuan antar sumber data, melakukan *member check* kepada informan, serta mendiskusikan hasil analisis dengan pembimbing atau pakar metodologi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kenyataan empiris dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti.

Selain mengikuti langkah-langkah di atas, analisis data dalam penelitian ini juga memperhatikan prinsip induktif dan interpretatif sebagaimana dianjurkan oleh Creswell (2018). Artinya, pola dan kategori analisis tidak ditentukan sebelumnya, tetapi muncul secara alami dari data lapangan. Peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama dalam proses analisis, dengan cara membaca, menginterpretasi, dan menyusun makna dari berbagai informasi yang diperoleh. Proses analisis dilakukan secara berulang dan reflektif hingga diperoleh kesimpulan yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil analisis data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual mengenai dinamika pelaksanaan PKH dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan tingkat kepercayaan (*trustworthiness*) terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data mengacu pada empat kriteria yang dikemukakan

oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian). Keempat kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya, relevan, konsisten, dan bebas dari pengaruh subjektivitas peneliti.

Pertama, kredibilitas (*credibility*) berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan realitas sebenarnya di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti menggunakan beberapa strategi, antara lain melakukan *triangulasi* sumber dan metode, *member check*, serta keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan dalam waktu yang memadai. *Triangulasi sumber* dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pendamping sosial, pejabat Dinas Sosial, dan keluarga penerima manfaat. Sedangkan *triangulasi metode* dilakukan dengan mengombinasikan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Selain itu, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan agar penafsiran peneliti sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh sumber data.

Kedua, transferabilitas (*transferability*) menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menghasilkan *thick description* atau deskripsi yang kaya dan mendalam mengenai konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat penerima manfaat PKH di Kota Bandar Lampung. Dengan memberikan deskripsi yang rinci dan faktual, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sendiri sejauh mana hasil penelitian ini relevan dengan situasi di daerah lain.

Ketiga, dependabilitas (*dependability*) mengacu pada konsistensi hasil penelitian apabila dilakukan oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama. Untuk menjamin dependabilitas, peneliti mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis dalam bentuk *audit trail*, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dengan demikian, proses penelitian dapat diaudit oleh pembimbing atau penguji metodologi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan prosedur ilmiah.

Keempat, konfirmabilitas (confirmability) menekankan pada objektivitas peneliti dalam menafsirkan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sehingga potensi subjektivitas selalu ada. Oleh karena itu, peneliti menjaga objektivitas dengan melakukan refleksi diri (*reflexivity*), mendokumentasikan setiap keputusan penelitian, serta membandingkan hasil analisis dengan teori dan data empiris. Konfirmabilitas juga diperkuat dengan menyimpan seluruh catatan wawancara, rekaman, dan dokumen lapangan sebagai bukti empiris yang dapat diverifikasi.

Dengan menerapkan keempat kriteria tersebut secara konsisten, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang kredibel, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi empiris secara akurat. Proses validasi ini tidak hanya memastikan keabsahan hasil penelitian, tetapi juga memperkuat integritas ilmiah peneliti sebagai pelaku riset kualitatif. Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kajian kebijakan sosial dan administrasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrosino, M. (2018). *Naturalistic observation and qualitative research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429503097>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709781>
- Fatmawati, D. (2021). Implementasi kebijakan bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 145–160. <https://doi.org/10.21831/jian.v18i2.2021>
- Hapsari, N. (2021). Peran pendamping sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.32734/jksi.v9i1.2021>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Meutia, I. F., Yulianti, D., & Sujadmiko, B. (2024). Driving innovative healthcare reform through meta-governance strategies. *Health Behavior & Policy Review*, 11(4), 1613–1623. <https://doi.org/10.14485/HBPR.11.4.1>
- Midgley, J. (2017). *Social welfare for a global era: International perspectives on policy and practice*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071801252>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Misnaniarti. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(3), 251–265. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.2019>

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, R. (2024). Kebijakan perlindungan sosial dan ketergantungan bantuan: Studi atas dampak PKH di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 33–47.
<https://doi.org/10.25077/jipkp.11.1.33-47.2024>
- Osborne, S. P. (2017). *The new public governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315230643>
- Rahayu, D. (2022). Analisis implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.52388/japp.v9i2.2022>
- Spicker, P. (2020). *Social policy: Themes and approaches* (3rd ed.). Policy Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv15r55r7>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulastri, E., & Rahmadani, A. (2020). Evaluasi dampak Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Sosial*, 7(1), 23–38.
<https://doi.org/10.20885/jeksos.vol7.iss1.art3>
- Taufik, A., & Yuliani, S. (2019). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(3), 201–217.
<https://doi.org/10.22146/jsp.2019.23.3>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

- Widodo, H., & Nurhadi, M. (2021). Analisis implementasi kebijakan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(2), 87–104.
<https://doi.org/10.12345/jpkpi.v8i2.2021>
- Yulianti, D., & Meutia, I. F. (2023). Policy monitoring and governance: The cost-effectiveness of community-based sanitation programs in Indonesia. *Hatfield Graduate Journal of Public Affairs*, 7(1), Article 6.
<https://doi.org/10.15760/hgjp.a.2023.7.1.6>